

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, tuntutan terhadap birokrasi pemerintahan juga semakin meningkat dari sekadar menjalankan tugas administratif menjadi mengupayakan pelayanan publik yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif. Pemerintah daerah di Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan transformasi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, seperti melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inisiatif One Data Indonesia.

Pengelolaan arsip digital menjadi komponen krusial agar data dapat diakses, digunakan, dan dikelola secara terpadu antarinstansi. Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SISMINKADA) merupakan salah satu inovasi digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. SISMINKADA mulai diterapkan sebagai sistem administrasi perkantoran berbasis internet yang dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, serta komunikasi antar-perangkat daerah secara elektronik. Pelaksana utama pengembangan dan pengelolaan SISMINKADA adalah Biro Umum, Humas, dan Protokol Sekretariat Daerah DIY bekerja sama dengan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Melalui sistem ini, seluruh proses administrasi surat dan arsip dapat dilakukan secara daring, sehingga mempercepat alur disposisi, meningkatkan ketertelusuran dokumen, dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan arsip pemerintahan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa digitalisasi arsip mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumen serta mendukung efisiensi kerja organisasi (Janah et al., 2024).

Tujuan utama dari implementasi SISMINKADA adalah untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran daerah yang tertib, efisien, dan berbasis sistem informasi. Sistem ini ditujukan bagi seluruh instansi pemerintah daerah di DIY,

termasuk sekretariat daerah, dinas, badan, dan lembaga teknis lainnya, agar tercipta mekanisme kerja birokrasi yang lebih profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta selaras dengan prinsip good governance. Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SISMINKADA) dibangun agar instansi-instansi pemerintah daerah dapat menyimpan, mengelola, dan mengintegrasikan data kearsipan secara elektronik. Namun, realita lapangan seringkali menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya berjalan secara interoperabel antara perangkat daerah. Interoperabilitas data (kemampuan sistem yang berbeda untuk bertukar dan menggunakan data secara efektif) menjadi titik krusial agar SISMINKADA tidak hanya berdiri sendiri, melainkan mampu menjembatani antarinstansi dengan lancar. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyebutkan bahwa digitalisasi kearsipan di Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek integrasi sistem, metadata, serta interoperabilitas data antarinstansi (Susana, 2025).

Perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintahan untuk melakukan transformasi digital dalam berbagai aspek pelayanan administrasi, termasuk dalam pengelolaan arsip dan persuratan. Digitalisasi kearsipan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan sistem kearsipan digital, proses pengelolaan dokumen dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.

Salah satu bentuk implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SISMINKADA). Sistem ini dikembangkan untuk mendukung pengelolaan arsip dan persuratan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi antar perangkat daerah. Dengan adanya SISMINKADA, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat bertransformasi menjadi berbasis digital, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja birokrasi serta mempercepat proses pengelolaan informasi dan arsip pemerintahan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis interoperabilitas data dalam penerapan sistem kearsipan digital, khususnya pada aplikasi SISMIKADA, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas birokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi implementasi sistem, faktor pendukung dan penghambat interoperabilitas data, serta kontribusinya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan berbasis teknologi informasi.(Hu et al., 2020).

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas kerja birokrasi, profesionalisme aparatur, serta kemampuan birokrasi daerah dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis tingkat interoperabilitas data SISMIKADA, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta implikasinya terhadap kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa tantangan utama interoperabilitas dalam e-government meliputi kurangnya integrasi sistem, perbedaan standar data, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (Wu et al., 2020). Selain itu, studi lain juga menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi dan kesiapan organisasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik(De & Heras, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas di pemerintahan daerah masih menemui hambatan signifikan. Misalnya, penelitian di Wonosobo, Jawa Tengah menemukan bahwa interoperabilitas di tingkat instansi masih rendah, terutama dalam aspek integrasi data dan metadata antarinstansi (Mutiarin et al., 2024). Lebih lanjut, penelitian terkait maturity of cross organizational interoperability menekankan bahwa faktor teknis, kebijakan, dan organisasi memengaruhi tingkat kematangan interoperabilitas (Wahyuni et al., 2024). Khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), penelitian terbaru menunjukkan bahwa dalam konteks smart city governance, interoperabilitas berkontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola perkotaan, sekaligus meningkatkan keamanan manusia (*human security*) melalui sinergi kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan integrasi sistem (Hardi et al., 2025).

Dalam konteks kearsipan, analisis kecenderungan digitalisasi arsip di Indonesia menemukan bahwa tantangan utama masih terletak pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, standarisasi metadata, dan interoperabilitas antarsistem (Susana, 2025). Dalam konteks DIY, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Setda DIY) merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam administrasi dan pengelolaan data lintas instansi.

Teori interoperabilitas data yang dikemukakan oleh Yannis Charalabidis digunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini karena relevan untuk menjelaskan proses integrasi dan pertukaran data antar sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Teori ini memandang interoperabilitas sebagai kemampuan berbagai sistem dan organisasi untuk saling bertukar, mengelola, dan memanfaatkan data secara efektif guna mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Menurut Charalabidis, interoperabilitas tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis sistem untuk saling terhubung, tetapi juga mencakup aspek hukum, organisasi, semantik, dan teknis yang harus berjalan secara selaras agar proses integrasi data dapat dilakukan secara optimal.

Melalui SISMINKADA, diharapkan interoperabilitas data dalam sistem kearsipan daerah dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang interoperabilitas data SISMINKADA yang berjalan pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Setda DIY. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atau pendukung, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengelolaan kearsipan di Pemerintah Provinsi DIY.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana interoperabilitas data pada SISMINKADA di Setda DIY ?
2. Bagaimana dampak penerapan SISMINKADA dalam peningkatan kualitas birokrasi yang Profesional dan Adaptif di Pemerintah Provinsi DIY ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini disusun untuk memperjelas ruang lingkup penelitian serta membatasi pembahasan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Pembatasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa variabel di luar batasan penelitian diperkirakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Batasan Lokasi

Penelitian ini dibatasi pada lingkungan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY sebagai unit analisis penelitian.

b. Batasan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SISMINKADA) yang digunakan dalam pengelolaan arsip dan administrasi surat menyurat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Batasan Metode Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga tidak mencakup pengujian teknis sistem secara eksperimental maupun pengembangan aplikasi.

d. Batasan Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan/atau kuesioner kepada aparatur yang terlibat langsung dalam penggunaan SISMINKADA, serta data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan internal, dan regulasi yang relevan.

e. Batasan Asumsi Penelitian

Penelitian ini mengasumsikan bahwa kebijakan terkait SPBE dan kearsipan digital di lingkungan Pemerintah Daerah DIY telah diterapkan secara formal dan relatif seragam pada periode penelitian, sehingga variasi kebijakan tersebut tidak dianalisis sebagai variabel yang memengaruhi hasil penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui alur interoperabilitas data antara instansi melalui SISMINKADA di Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY.
- b. Mengetahui dampak SISMINKADA dalam interoperabilitas terhadap kualitas birokrasi, khususnya profesionalisme dan adaptivitas aparatur di DIY.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan tata kelola pemerintahan daerah berbasis sistem informasi kearsipan digital dan interoperabilitas data.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Menambah khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan administrasi publik digital, khususnya yang berkaitan dengan konsep interoperabilitas data dalam sistem informasi pemerintahan daerah.
- 2) Memberikan kontribusi konseptual mengenai hubungan antara interoperabilitas data, sistem kearsipan digital (SISMINKADA), dan kualitas birokrasi, terutama dalam aspek profesionalisme dan adaptivitas aparatur pemerintah daerah.
- 3) Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji digital governance, manajemen arsip elektronik, serta integrasi data lintas instansi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Sekretariat Daerah DIY, dalam mengoptimalkan penerapan interoperabilitas data pada Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SISMINKADA).

- 2) Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan teknis, standar operasional prosedur (SOP), serta penguatan tata kelola data dan arsip digital agar sistem kearsipan dapat digunakan secara terintegrasi antarperangkat daerah.
- 3) Mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, terutama dalam pemanfaatan sistem informasi kearsipan digital, sehingga dapat mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis data.
- 4) Menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain yang berencana atau sedang mengembangkan sistem kearsipan digital dan interoperabilitas data sebagai bagian dari implementasi SPBE dan transformasi digital pemerintahan,

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai alur dan isi pembahasan pada setiap bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya interoperabilitas data dalam Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SISMINKADA) sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan daerah. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan skripsi.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep interoperabilitas data, Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SISMINKADA), dan kualitas birokrasi. Bab ini juga memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, definisi konseptual dan operasional variabel penelitian, serta kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik uji keabsahan data. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis proses penelitian yang dilakukan dalam mengkaji interoperabilitas data pada SISMINKADA dan dampaknya terhadap kualitas birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada analisis tingkat interoperabilitas data pada SISMINKADA, faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, serta dampaknya terhadap profesionalisme dan adaptivitas aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan penelitian terdahulu.

e. **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil dan pembahasan penelitian, serta saran yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan interoperabilitas data dan peningkatan kualitas birokrasi di masa mendatang.